



Setiap Tahun Kurang Siswa

■ Sistem Zonasi Tak Selesaikan Persoalan Minim Murid



Posisi kita berdekatan dengan Jawa Tengah dan Gunung Kidul, sehingga banyak siswa memilih sekolah di Jawa Tengah. Padahal, kita sudah sosialisasi ke 13 SD untuk bisa memenuhi kouta, tapi tetap saja (kekurangan).

Nurani
Kepala Sekolah SMPN 3 Prambanan

SLEMAN, TRIBUN – Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 tak menyembuhkan persoalan kekurangan siswa yang sering dialami sekolah pinggiran. Perpanjangan waktu merekrut siswa secara *offline* tetap sia-sia.

SMPN 3 Prambanan, sekolah yang berada di perbatasan DIY dan Jawa Tengah (Jateng), tahun ini masih kekurangan 42 siswa. Dari daya tampung 128 siswa, hanya terisi 86 saja.

"Kita kemarin diberikan perpanjangan waktu sampai 14 Juli 2018. Kita juga sudah berusaha sosialisasi, namun masih tetap kurang," kata Kepala Sekolah SMPN 3 Prambanan, Nurani.

Ia mengungkapkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sudah memberi perpanjangan waktu bagi SMPN 3 Prambanan untuk melakukan pendaftaran secara *offline*. Namun, tetap saja kekurangan siswa.

Faktor yang menjadi kendala masih adanya kekurangan siswa tersebut, antara lain, wilayah SMPN 3 Prambanan berdekatan dengan Jateng dan Gunung Kidul.

"Posisi kita berdekatan dengan Jawa Tengah dan Gunung Kidul, sehingga banyak siswa memilih sekolah di Jawa Tengah. Padahal, kita sudah sosialisasi ke 13 SD untuk bisa memenuhi kouta, tapi tetap saja (kekurangan)," terangnya.

Menyikapi hal tersebut, Nurani, mengatakan, tahun depan akan lebih memaksimalkan sosialisasi. Mengingat tahun lalu kasus serupa juga terjadi di SMPN 3 Prambanan. "Tahun ini kita sosialisasi hanya di 13 SD. Kita akan tambah menjadi 20 SD," katanya.

Hal serupa terjadi di SMPN 4 Prambanan. Dari daya tampung 63, hanya terisi 47 saja.

● ke halaman 11

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi

Setiap Tahun Kurang

• Sambungan Hal 1

Kepala Sekolah SMPN 4 Prambanan, Sudaryono, mengatakan, saat ada perpanjangan waktu untuk pendaftaran secara *offline* dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, sekolahnya hanya mendapat dua tambahan siswa saja.

"Sampai 14 Juli 2018, kita hanya mendapat tambahan dua siswa, dari yang sebelumnya kekurangan 18 siswa. Sebelumnya ada yang daftar lima, namun dua mengundurkan diri, sedangkan yang satu tidak registrasi," katanya.

Dia menjelaskan, dari ketercukupan siswa sebenarnya SMPN 3 Prambanan sudah mencukupi.

"Kami standarnya untuk satu kelas hanya 20 siswa. Penuhnya 30 siswa. Jadi jika sudah lebih dari 20 itu sudah boleh. Kalau saya melihat sisi positifnya saja. Kalau siswa sedikit, nanti anak bisa menerima pelajaran lebih efektif," terangnya.

Sudaryono mengatakan, pihak sekolah dari awal sudah melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan Sleman.

"Dari PPDB jelas kita kurang. Sekolah masih kurang, meskipun diberi kesempatan membuka pendaftaran tahap kedua sampai 14 Juli. Setiap saat kita juga komunikasi dengan Disdik," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Sri Wantini, mengatakan, kekurangan siswa di SMPN 3 Prambanan dan SMPN 4 Prambanan, hampir terjadi setiap tahun.

Untuk kekurangan siswa di SMPN 3 Prambanan, pihak sekolah bersama Disdikpora DIY akan komunikasi dengan Disdikpora Jateng, mengingat posisi SMPN 3 Prambanan berada di perbatasan DIY dan Jateng.

"Dari tahun ke tahun memang seperti itu. Ini tidak hanya terjadi di Sleman. Ini juga tergantung anak usia sekolah yang berada di sekitar SMP yang bersangkutan," katanya.

Dijelaskan, Disdik Sleman masih memperkenankan SMPN 3 Prambanan dan SMPN 4 Prambanan menerima siswa lagi sampai akhir Juli, kalau memang didapat ada anak usia sekolah yang belum mendapatkan sekolah.

"Sampai akhir Juli kita masih perkenankan kedua SMP tersebut menerima siswa yang belum mendapatkan sekolah. Kami sudah memberi tenggat waktu sampai 14 Juli 2018. Namun, jika masih kurang dan ada siswa belum dapat sekolah, masih boleh menerima. Agustus sudah final," terangnya.

Wantini menjelaskan, meskipun setiap tahun masih ada kekurangan di kedua SMP tersebut, pihaknya tidak akan mengurangi jatah rombongan belajar atau daya tampung di sekolah tersebut.

"Sekolah diharap lebih gencar lagi dalam sosialisasi PPDB ke masyarakat seki-

tarinya. Prinsip kami jangan sampai ada anak usia sekolah yang tidak sekolah," katanya.

Kursi Kosong

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta saat ini sedang melakukan pendataan jumlah kursi kosong yang tersebar di seluruh SMP negeri. Sampai saat ini, tercatat sekitar delapan kursi kosong di 16 sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana, sedang menyiapkan langkah untuk mengisi kursi kosong tersebut. "Kita akan tindak lanjut. Kalau memungkinkan minggu ini. Namun, apapun yang kami lakukan harus ada payung hukumnya," tegasnya.

Skema pengisian kursi kosong tersebut tetap mengacu pada prinsip PPDB zonasi. Patokan yang digunakan bukan nilai, melainkan melihat jarak siswa terdekat dari sekolah tersebut.

"Bagi yang sudah daftar di SMP negeri, tidak boleh mengisi kursi yang kosong tersebut," tuturnya.

Edy juga memberikan konfirmasi mengenai keluhan orangtua siswa yang mengadu ke Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta terkait PPDB, semisal persoalan *blank spot*. Menurut dia, Dinas Pendidikan telah memberi dua kali kesempatan, dimana peserta didik baru bisa mengakses 16 pilihan sekolah.

"Disdik sudah mengantisipasi *blank spot* dengan jalur prestasi. Jangan menyalahkan kami karena tidak memanfaatkan 16 pilihan sekolah. Tidak dimanfaatkan lalu protes. Kalau memanfaatkan 16 sekolah untuk dipilih semua, pasti masuk," tegasnya. kemarin.

la menuturkan, sebelum pelaksanaan PPDB jenjang SMP berbasis zonasi, pihaknya telah melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk memilih 16 sekolah. "Saya masih menyimpan rekamannya," tandasnya.

Disinggung temuan Forpi Kota Yogyakarta di SMPN 5 Yogyakarta yang menemukan empat kursi kosong setelah proses pendaftaran ulang, Edy membantahnya.

"Di SMPN 5 hanya sisa dua kursi kosong. Dua siswa lainnya sudah daftar ulang. Daftar ulangnya sudah mepet. Tapi mereka masuk. Jadi hanya sisa dua kursi," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba, menjelaskan, daya tampung di SMPN 5 Yogyakarta sebanyak 320 siswa. Dari jumlah tersebut, pada saat proses PPDB masih berlangsung, terpenuhi semuanya. Namun, pada saat daftar ulang ada sebanyak empat siswa yang tak melakukan daftar ulang, sehingga dianggap mengundurkan diri.

"Pendaftaran ulang paling lambat 9 Juli 2018. Anehnya, pada 12 Juli 2018 ada dua siswa diterima jalur khusus melalui Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Padahal, daftar ulang sudah ditutup, dan informasi dari Waka Kurikulum SMPN 5 Yogyakarta, bahwa dua siswa tersebut tidak mengikuti

tes akademik," tuturnya. Atas klarifikasi dan temuan tersebut, Forpi Kota Yogyakarta meminta agar proses PPDB bisa transparan ke publik, dan dilakukan evaluasi bersama agar ke depan proses PPDB di Kota Yogyakarta lebih baik.

Forpi Kota Yogyakarta mendorong Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memberi penjelasan kepada publik, dan membuka data terkait diterimanya dua siswa lewat jalur khusus tersebut.

"Jadwal daftar ulang sudah ditutup. Seleksi NEM sudah lewat. Dua siswa tersebut tidak mengikuti tes akademik di SMP 5 Yogyakarta. Payung hukumnya apa, sehingga dua siswa tersebut diterima. Ini perlu dijelaskan," bebernya.

Terkait jalur khusus yang diungkap Forpi Kota Yogyakarta, Panitia PPDB SMPN 5 Yogyakarta, Waldi, mengungkapkan, pihak sekolah sudah menjalankan proses PPDB sesuai petunjuk teknis Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Kewenangan merekomendasikan siswa baru melalui jalur khusus kategori anak pejabat negara adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Rekomendasi ditunjukkan melalui surat resmi dari dinas yang menyatakan bahwa calon siswa baru tersebut diberi kemudahan mendaftar melalui jalur khusus.

Adapun jalur khusus yang dimaksud yakni, calon peserta didik atau siswa baru melalui jalur khusus (anak pejabat negara) dengan kuota lima persen dari daya tampung sekolah.

"Kami (sekolah) tak memiliki wewenang menentukan siapa calon siswa yang bisa memiliki kesempatan menjadi siswa di sini melalui jalur khusus (anak pejabat) tersebut. Jadi sekolah terima beres saja," terang Waldi.

Menurut Waldi, berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomer 188/0472 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan dengan Sistem Real Time Online di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2018/2019, daya tampung SMPN 5 Yogyakarta 320 siswa.

Calon peserta didik baru penduduk daerah baru prestasi mendapat kuota 15 persen dari daya tampung, yakni 48 siswa. Sedangkan untuk calon peserta didik baru dari penduduk luar kota mendapatkan jatah lima persen dari daya tampung, yakni 16 siswa.

Sementara itu, untuk calon peserta didik baru jalur khusus (anak pejabat negara yang bertugas di Kota Yogyakarta), mendapatkan kuota lima persen, yakni 16 siswa. Dan, calon peserta didik baru daerah zonasi mendapatkan jatah minimal 75 persen dari daya tampung, yakni 240 siswa.

"Jalur khusus anak pejabat negara yang bertugas di

Kota Yogyakarta dilengkapi dokumen terkait surat tugas kepindahan dari negara, bencana alam atau sosial yang ditetapkan pemerintah daerah. Pelaksanaan jalur khusus bersama dengan jalur prestasi," terang Waldi.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Dwi Budi Utomo, mengatakan, seharusnya proses PPDB berjalan transparan. Terkait permasalahan jumlah kursi di SMPN 5 Yogyakarta, ia akan menyampaikan masalah tersebut kepada pimpinan, sehingga segera bisa ditindaklanjuti.

Kekosongan kursi pasca PPDB, kata dia, terjadi karena berbagai hal. Di antaranya adalah adanya siswa yang dinyatakan diterima di sekolah tersebut, namun tidak melakukan daftar ulang, sehingga masih menyisakan kursi. "Lalu untuk zonasi ini kan sistem baru, sehingga masih butuh adaptasi," ujarnya.

Politisi PKS tersebut, mengungkapkan, sebenarnya prosedur pengisian kursi kosong bisa langsung diterapkan. Namun, hal itu mengacu pada ketetapan, tapi jangan sampai melanggar aturan. Pengisian kursi bisa melanjutkan urutan dari daftar siswa zonasi di sekolah yang bersangkutan.

"Kalau dasar substantifnya bahwa kursi di sekolah adalah hak masyarakat sekaligus kewajiban pemerintah apalagi sudah dibiayai oleh APBN dan APBD, mubazir kalau kosong," tuturnya.

Wali Kota Yogyakarta, Harjadi Suyuti, ketika disinggung perihal permasalahan kursi di SMPN 5 Yogyakarta, tidak mau berkomentar banyak. Ia akan melihat duduk perkaranya terlebih dahulu. "Saya tidak bisa menanggapi sekarang. Saya lihat dulu persoalannya besok," pungkasnya.

Kaji Area Blank Spot

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengatakan, Pemkot Yogyakarta sedang melakukan kajian terkait nasib siswa yang berada di area *blank spot*. Ia menyampaikan, ada beberapa kursi kosong di SMP negeri. Namun, jumlahnya belum bisa dipastikan.

"Kami, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, minta waktu untuk menghitung dulu; ada berapa yang kosong, cara mengisinya bagaimana, bisa nggak yang *blank spot* menjadi tempat spesial untuk prioritas," ujarnya.

Heroe menambahkan, kajian tersebut termasuk membahas mengenai kemungkinan perpindahan siswa dari sekolah satu ke sekolah yang masih ada sisa kursi. "Berdasarkan nilai semester berapa, ini sedang dikaji. Lalu perpindahan kan ada aturannya. Akreditasi sekolah harus sama," ucapnya.

Kemunculan *blank spot* dalam sistem zonasi, kata dia, sudah diantisipasi dengan menerapkan kebijakan satu siswa boleh memasukkan 16 pilihan sekolah.

"Kalau tahun ini *blank spot* ada di Umbulharjo. Tahun depan bisa berubah lagi. Ini kan karena sebaran lulusan berbeda tiap tahunnya. Kami sedang menginventarisasi masalah yang ada. Jangan sampai terulang tahun depan," tegasnya. (cr3kuriyud)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005